

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah yang diberlakukan sejak awal reformasi bertujuan untuk mendorong kemandirian fiskal dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Setiap daerah dituntut mampu menggali potensi ekonominya sendiri serta mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien. Kinerja pendapatan daerah merupakan gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan merealisasikan seluruh sumber pendapatan yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd). Menurut mardiasmo (2018), kinerja pendapatan daerah dapat diukur melalui tingkat efektivitas dan pertumbuhan realisasi pendapatan dibandingkan dengan target yang telah direncanakan, khususnya pendapatan asli daerah (pad) sebagai indikator utama kemandirian fiskal daerah.

Kinerja pendapatan yang baik menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal, meningkatkan kepatuhan pajak dan retribusi, serta mengoptimalkan pengelolaan aset daerah. Pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia sejak awal era reformasi merupakan tonggak penting dalam perubahan paradigma pemerintahan. Otonomi daerah dirancang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat demokratisasi, mempercepat pemerataan pembangunan, serta mendorong daerah agar lebih mandiri dalam pengelolaan sumber daya dan keuangannya. Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Tujuannya adalah agar daerah mampu merespons kebutuhan lokal secara lebih efektif, sesuai dengan karakteristik, potensi, dan tantangan masing-masing wilayah.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah adalah pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang memadai akan memperlancar mobilitas barang dan jasa, membuka akses ke wilayah terpencil, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi strategis.

Provinsi Sulawesi Selatan sejak beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan ekonomi yang positif, namun juga disertai tantangan struktural yang cukup signifikan. Sebagai salah satu provinsi dengan populasi besar di Indonesia (jumlah penduduk pada tahun 2023 tercatat sekitar 9,362,290 jiwa dengan tingkat kepadatan 207 jiwa/km²). Perekonomian provinsi ini tercermin melalui produk domestik regional bruto (pdrb) yang menyediakan gambaran nilai tambah ekonomi wilayah, dimana menurut data resmi badan pusat statistik provinsi Sulawesi Selatan (bps Sulsel) dalam publikasi produk domestik regional bruto provinsi Sulawesi Selatan menurut pengeluaran 2020-2024” telah dirilis sebagai dasar untuk analisis permintaan akhir. Sebagai contoh, pdrb atas dasar harga berlaku tahun 2020 mencapai Rp 504,48 triliun. Sedangkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,02 % dibanding tahun sebelumnya.

Meskipun capaian pertumbuhan tersebut positif, terdapat disparitas antar wilayah di Sulawesi Selatan antar kabupaten/kota yang mengindikasikan bahwa akses dan kualitas infrastruktur, ketersediaan dan distribusi sdm, serta kepadatan penduduk belum merata secara optimal. Sebagai contoh di bidang infrastruktur jalan, data tahun 2025 menyebutkan panjang jalan di provinsi ini mencapai 30.046,54 km, dengan ruas jalan kabupaten/kota yang membentang hingga 26.293,11 km. Sementara lembaga perencanaan nasional seperti badan perencanaan dan pembangunan nasional (bappenas) telah mengalokasikan Rp 581 miliar khusus untuk infrastruktur jalan daerah di Sulawesi Selatan pada tahun 2023 sebagai salah satu bentuk prioritas pembangunan.

Di sisi kependudukan, jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan penduduk yang terus berlangsung berdampak pada tekanan

terhadap sistem pelayanan, penyediaan sdm yang bermutu, serta kebutuhan infrastruktur penunjang ekonomi. Data menunjukkan bahwa penduduk miskin di sulsel per maret 2024 tercatat sebanyak 736.480 orang (setara dengan 8,06 % dari total penduduk) setelah menurun dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa meski ada perbaikan, tantangan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kapasitas sdm masih nyata.

Sementara itu, mutu sumber daya manusia (sdm) yang bisa diukur melalui indikator seperti tingkat pendidikan, keterampilan, dan indikator ketenagakerjaan menjadi variabel penting yang memengaruhi kinerja ekonomi daerah dan keuangan daerah melalui peningkatan produktivitas dan kemampuan daerah untuk menghasilkan penerimaan maupun pengeluaran yang efektif. Meskipun data spesifik mutu sdm di sulawesi selatan dalam kajian ini membutuhkan pendalaman lebih lanjut, pemerintah provinsi telah menempatkan prioritas pada pembangunan sdm sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka-menengah dan jangka panjang.

Konteks keuangan daerah juga tidak terlepas dari peran pdrb sebagai indikator makro yang mencerminkan kapasitas ekonomi dan potensi fiskal daerah. Semakin tinggi pdrb suatu wilayah, secara teori semakin besar basis ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, investasi, dan layanan publik yang pada gilirannya meningkatkan kinerja pendapatan daerah. Oleh karena itu, pemahaman mengenai bagaimana infrastruktur, jumlah penduduk dan mutu sdm mempengaruhi kinerja pendapatan daerah melalui pdrb di sulawesi selatan, menjadi sangat relevan untuk menjawab persoalan ketimpangan antar kabupaten/kota serta memastikan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, kajian ini penting untuk mengetahui sejauh mana pengaruh langsung dan tidak langsung dari infrastruktur, jumlah penduduk, dan mutu

sdm terhadap kinerja pendapatan daerah melalui pdrb, dengan fokus khusus di provinsi sulawesi selatan

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah infrastruktur berpengaruh terhadap kinerja pendapatan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pdrb di provinsi sulawesi selatan?
2. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap kinerja pendapatan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pdrb di provinsi sulawesi selatan?
3. Apakah mutu sdm berpengaruh terhadap kinerja pendapatan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pdrb di provinsi sulawesi selatan?

1.3 tujuan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh infrastruktur terhadap kinerja pendapatan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pdrb di provinsi sulawesi selatan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap kinerja pendapatan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pdrb di provinsi sulawesi selatan
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh terhadap kinerja pendapatan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pdrb di provinsi sulawesi selatan

1.4 Manfaat

1. Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi untuk penelitian yang relevan di masa yang akan datang.
2. Dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi pemerintah daerah provinsi sulawesi selatan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 teori keynesian

Keynesian dikenal juga dengan istilah ekonomi keynesian atau teori keynesian merupakan suatu teori terkait dengan bidang ekonomi yang didasarkan pada gagasan seorang ekonom dari inggris pada abad ke-20 yaitu john maynard keynes. Teori ini membahas mengenai ekonomi campuran dimana negara dan sektor swasta sangat memainkan peran yang sangat penting. Kebangkitan ekonomi keynesian menjadi sebuah tanda atas berakhirnya ekonomi liberal, sebuah teori ekonomi yang mendasarkan keyakinan bahwa pasar dan sektor swasta dapat berjalan dan berfungsi secara independen tanpa ada campur tangan dari sektor swasta dan pemerintah. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan ekonomi makro memberi pengaruh pada perilaku individu ekonomi mikro. Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat memiliki peran penting sebagai penggerak perekonomian, terutama dalam perekonomian yang tetap atau konstan. Keynes mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk melakukan peningkatan permintaan di tingkat makro, mengurangi pengangguran dan terjadinya deflasi.

Teori keynes mengungkapkan bahwa hubungan antara infrastruktur, jumlah penduduk, mutu sumber daya manusia, kinerja pendapatan daerah dan produk domestik regional bruto (pdrb) bersifat saling terkait dan kompleks. Pembangunan infrastruktur melalui belanja pemerintah dipandang sebagai bentuk investasi yang mampu meningkatkan permintaan agregat, membuka lapangan kerja, dan mendorong aktivitas ekonomi. Jumlah penduduk yang besar, apabila didukung oleh mutu sumber daya manusia yang baik, akan meningkatkan produktivitas dan daya beli masyarakat, sehingga memperkuat kegiatan produksi dan konsumsi. Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut tercermin dalam pertumbuhan pdrb daerah. Selanjutnya, meningkatnya pdrb akan berdampak pada bertambahnya pad melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah, yang kemudian dapat dimanfaatkan kembali oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.1.2 teori human capital

Teori *human capital* memandang sumber daya manusia sebagai aset utama dalam pembangunan ekonomi karena kualitas manusia menentukan tingkat produktivitas dan kemampuan daerah dalam mengelola potensi yang dimilikinya. Dalam kerangka ini, infrastruktur berperan sebagai faktor pendukung penting, karena

ketersediaan sarana pendidikan, kesehatan, transportasi, dan teknologi akan memudahkan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan, sehingga mutu sdm dapat berkembang secara optimal. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi ekonomi apabila didukung oleh mutu sdm yang baik, karena penduduk yang terdidik dan terampil mampu berperan sebagai tenaga kerja produktif sekaligus pasar yang mendorong aktivitas ekonomi. Peningkatan mutu sdm akan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi, yang selanjutnya mendorong pertumbuhan produk domestik regional bruto (pdrb) sebagai indikator kinerja ekonomi daerah. Pertumbuhan pdrb tersebut kemudian akan memperluas basis penerimaan daerah melalui peningkatan aktivitas ekonomi, sehingga kinerja pendapatan daerah juga meningkat. Dengan demikian, teori *human capital* menjelaskan adanya hubungan yang saling memperkuat antara infrastruktur, jumlah penduduk, mutu sdm, pdrb, dan kinerja pendapatan daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Pdrb (Produk Domestik Regional Bruto)

1. Pengertian pdrb (produk domestik regional bruto)

Pdrb salah satu merupakan penanda yang wajib guna mengenali keadaan ekonomi di suatu daerah/regional dalam suatu masa tertentu ialah produk domestik regional bruto (pdrb), baik menurut ketentuan harga berlaku ataupun menurut ketentuan harga konstan. Pdrb pada umumnya adalah keseluruhan nilai tambah yang didapatkan dari segala unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau menggambarkan keseluruhan nilai barang serta jasa akhir yang didapatkan oleh segala aspek ekonomi. Pdrb memiliki dua pendekatan, ialah produksi dan penggunaan. Keduanya menyuguhkan bahan-bahan informasi nilai tambah dirinci dari sumber aktifitas ekonomi (lapangan usaha) serta dari unsur kegunaannya. Pdrb dari bidang lapangan usaha ialah suatu penjumlahan dari segala unsur nilai tambah bruto yang dapat dilahirkan dari lapangan usaha atas bermacam-macam kegiatan produksinya. Sebaliknya dari bidang penggunaan memaparkan atas pemakaian dari nilai tambah tersebut.

Produk domestik regional bruto (pdrb) merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk menggambarkan kondisi dan kinerja perekonomian suatu daerah. Menurut nasichah dan mashuri (2024), pdrb didefinisikan sebagai total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah pada periode waktu tertentu, tanpa memperhatikan kepemilikan faktor produksinya. Pdrb mencerminkan kontribusi berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa, terhadap pembentukan output ekonomi daerah. Melalui pdrb, dapat diketahui struktur perekonomian daerah, tingkat pertumbuhan ekonomi, serta pergeseran peran antar sektor ekonomi dari waktu ke

waktu. Oleh karena itu, pdrb tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan, evaluasi kinerja ekonomi daerah, serta analisis kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut todaro dan smith (2011), pdrb mencerminkan kapasitas ekonomi daerah dalam menciptakan nilai tambah dan merupakan indikator utama pembangunan ekonomi regional. Mereka menjelaskan bahwa pertumbuhan nilai tambah di suatu wilayah menunjukkan adanya peningkatan taraf hidup, penyerapan tenaga kerja, dan perubahan struktur ekonomi. Todaro juga menekankan bahwa pergeseran kontribusi sektor-sektor ekonomi dalam pdrb menjadi indikator transformasi ekonomi dari sektor tradisional menuju sektor modern.

Pdrb merupakan ukuran makroekonomi yang sangat penting dalam menilai kapasitas produksi suatu wilayah yakni nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di wilayah tersebut dalam satu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan (sebagai indikator pertumbuhan riil).

Pdrb menjadi variabel intervening atau mediasi antara faktor-struktur (seperti infrastruktur, jumlah penduduk, mutu sdm) dan kinerja pendapatan daerah. Infrastruktur yang baik meningkatkan produktivitas, jumlah penduduk yang besar memberikan pasar dan tenaga kerja, dan mutu sdm mendorong efisiensi produksi sehingga meningkatkan pdrb. Saat pdrb meningkat, potensi ekonomi daerah juga membaik, yang kemudian membuka ruang bagi peningkatan pendapatan daerah (termasuk penerimaan asli daerah), alokasi belanja yang lebih baik, dan akhirnya peningkatan kinerja pendapatan daerah. Dalam rentang 2010-2024, sulawesi selatan menunjukkan data yang mendukung bahwa pdrb terus tumbuh nominalnya, dan saat pemulihan pasca pandemi menunjukkan pertumbuhan 5,02 %(persen) di tahun 2024.

2.1.4 Kinerja Pendapatan Daerah

1. Pengertian kinerja pendapatan daerah

Kinerja pendapatan daerah merupakan indikator penting dalam menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun dan mengelola sumber-sumber penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah (pad), dana transfer, serta pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut mardiasmo (2018), kinerja pendapatan daerah mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan

belanja daerah (apbd). Semakin tinggi tingkat realisasi pendapatan, maka semakin baik pula kinerja fiskal daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.

Selain itu dalam penelitian halim (2014) menyatakan bahwa kinerja pendapatan daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan kemandirian keuangan daerah. Daerah dengan kinerja pendapatan yang baik cenderung memiliki ketergantungan yang lebih rendah terhadap pemerintah pusat, sehingga memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menentukan prioritas pembangunan ekonomi sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. Kemandirian fiskal tersebut menjadi prasyarat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Dalam konteks ekonomi, kinerja pendapatan daerah yang optimal memberikan berbagai manfaat, antara lain meningkatkan kapasitas belanja pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan; mendorong aktivitas ekonomi melalui penyediaan layanan publik yang lebih baik; serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Todaro dan smith (2015) menegaskan bahwa peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi sumber daya yang lebih efektif.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kinerja pendapatan daerah tercermin dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah (pad), guna membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Lebih lanjut, undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menjelaskan bahwa pendapatan daerah bersumber dari pad, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kinerja pendapatan daerah dapat dinilai melalui tingkat keberhasilan daerah dalam menggali potensi pendapatan tersebut secara optimal dan berkelanjutan. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam meningkatkan pad, maka semakin kuat pula kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Sumber pendapatan daerah

Sumber pendapatan daerah merupakan seluruh penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu

periode anggaran. Menurut mardiasmo (2018), pendapatan daerah adalah instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah karena menjadi dasar pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Pendapatan daerah mencerminkan kemampuan fiskal serta tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola potensi ekonominya.

Dalam penelitian halim (2014) menjelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (pad), dana transfer dari pemerintah pusat, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pad meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pad yang sah. Dana transfer mencakup dana alokasi umum (dau), dana alokasi khusus (dak), dan dana bagi hasil (dbh), yang berfungsi untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah. Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah berasal dari hibah dan pendapatan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, syafrizal (2014) menegaskan bahwa optimalisasi sumber pendapatan daerah, khususnya pad, sangat penting dalam memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

2.1.5 infrastruktur

Pengertian infrastruktur

Dalam konteks ekonomi, *infrastruktur* dipahami sebagai fasilitas dan struktur dasar yang disediakan untuk mendukung kegiatan ekonomi serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam suatu wilayah. Menurut bado & dunakhir (2024) infrastruktur mencakup sistem transportasi, energi, telekomunikasi, dan fasilitas publik lainnya yang berfungsi untuk memperlancar mobilitas barang dan jasa, memperluas akses pasar, serta menurunkan biaya transaksi, sehingga memberikan kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Infrastruktur yang memadai tidak hanya meningkatkan konektivitas antar wilayah, tetapi juga berperan dalam memperluas peluang kerja, menarik investasi, serta mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial masyarakat.

Menurut viona retno oktaviani, anggun lestari, ginta ahmad prayudha, dan anas malik (2024) infrastruktur dipahami sebagai elemen dasar pembangunan ekonomi yang mencakup penyediaan fasilitas fisik seperti jalan, listrik, air bersih, dan fasilitas sosial lainnya yang bekerja sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi regional.

Berdasarkan sejumlah pandangan yang telah disampaikan, infrastruktur yang baik mampu menarik investasi, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan akses

masyarakat terhadap layanan publik, dan memperkuat konektivitas antar wilayah. Dengan demikian, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur tidak hanya menjadi kebutuhan dasar, tetapi juga berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kinerja daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

1. Jenis-jenis infrastruktur

Infrastruktur dalam konteks ekonomi mencakup berbagai fasilitas dasar yang mendukung kegiatan produksi, distribusi, serta pelayanan publik sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Beberapa jenis infrastruktur yang penting antara lain:

1. Infrastruktur transportasi seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang memperlancar pergerakan orang dan barang.
2. Infrastruktur utilitas termasuk listrik, air bersih, dan jaringan energi yang menjadi landasan operasional kegiatan industri dan rumah tangga.
3. Infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi yang memfasilitasi arus informasi dan transaksi ekonomi digital.
4. Infrastruktur sosial seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berkontribusi dalam peningkatan mutu sumber daya manusia. Penelitian-penelitian empiris menunjukkan besarnya kontribusi infrastruktur terhadap perekonomian, misalnya penelitian hanum, syahputra, dan sea (2025) yang menyoroti peran infrastruktur jalan dan listrik dalam pertumbuhan ekonomi indonesia, serta studi hutaauruk (2021) yang menemukan bahwa panjang jalan, jumlah air bersih, dan energi listrik berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota pematangsiantar, yang mencerminkan peran berbagai jenis infrastruktur dalam mendorong kinerja ekonomi daerah.

2. Faktor yang mempengaruhi tingkat infrastruktur

Dalam penelitian mose & moro (2025) ada beberapa faktor penting yang memengaruhi perkembangan infrastruktur suatu wilayah, yaitu pertumbuhan ekonomi, utang publik (public debt), dan investasi asing langsung (foreign direct investment/fdi), menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat memberi ruang fiskal untuk investasi infrastruktur, sementara investasi asing dan manajemen utang memainkan peran penting dalam menyediakan dana yang diperlukan untuk membangun dan memperluas fasilitas infrastruktur.

Penelitian lain oleh sudaryo, rachmad, zamzami, & safri (2025) menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti upah minimum provinsi (ump), pertumbuhan tenaga kerja konstruksi, pendapatan asli daerah (pad), dan total belanja pemerintah provinsi

berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja untuk infrastruktur. Ini berarti sumber daya fiskal daerah dan dinamika tenaga kerja juga menjadi determinan penting dalam pembangunan infrastruktur regional.

3. Manfaat infrastruktur

Adapun manfaat infrastruktur sebagai berikut:

Infrastruktur memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah karena berfungsi sebagai fondasi bagi aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Menurut bado dan dunakhir (2024), investasi dalam infrastruktur seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, mempercepat mobilitas, dan memperluas akses pasar sehingga mendorong pertumbuhan dan pemerataan economic output. Penelitian ini menunjukkan bahwa infrastruktur yang memadai tidak hanya memperlancar arus barang dan jasa, tetapi juga membantu mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi dengan membuka kesempatan kerja serta akses ke peluang ekonomi yang lebih luas.

Selain itu, dalam penelitian fadli, daulay, muhammad, mulya, juwita, dan sakira (2025) pada proyek pembangunan bendungan bagong di kabupaten trenggalek menegaskan bahwa infrastruktur yang dibangun secara strategis memberikan *manfaat ekonomi langsung*, seperti peningkatan output, penciptaan lapangan kerja, dan kenaikan upah pekerja. Infrastruktur seperti bendungan juga mampu mendukung sektor pertanian melalui penyediaan air irigasi, mengurangi risiko bencana banjir, serta membuka peluang sektor pariwisata dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Dari hal-hal yang dikemukakan di atas bahwa infrastruktur memberikan manfaat ekonomi yang luas, baik melalui dampak langsung maupun dampak tidak langsung. Secara langsung, infrastruktur mempercepat mobilitas barang dan jasa, menurunkan biaya produksi dan distribusi, serta meningkatkan efisiensi operasional. Contohnya, pembangunan jalan dan jembatan mempermudah transportasi barang dari produsen ke pasar sehingga menurunkan biaya logistik, sedangkan jaringan listrik dan air bersih memungkinkan aktivitas industri dan rumah tangga berjalan lancar, meningkatkan produktivitas dan output ekonomi. Selain itu, infrastruktur seperti bendungan atau sistem irigasi secara langsung mendukung sektor pertanian dengan menyediakan air yang stabil, meningkatkan hasil panen, dan membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal (fadli et al., 2025).

Secara tidak langsung, infrastruktur mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui peningkatan investasi dan kualitas sumber daya manusia. Infrastruktur yang memadai menarik investor karena wilayah menjadi lebih kompetitif, sehingga

muncul peluang bisnis baru dan penciptaan lapangan kerja tambahan. Fasilitas pendidikan dan kesehatan yang baik juga meningkatkan mutu sdm, menjadikan tenaga kerja lebih produktif dan berdaya saing (bado & dunakhir, 2024). Infrastruktur digital dan telekomunikasi mempercepat arus informasi, mempermudah transaksi ekonomi, dan meningkatkan konektivitas antarwilayah, yang secara tidak langsung berkontribusi pada pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.6 Jumlah Penduduk

1. Pengertian jumlah penduduk

Jumlah penduduk adalah total individu yang menempati suatu wilayah pada waktu tertentu. Jumlah penduduk sering digunakan sebagai indikator demografi yang memengaruhi berbagai aspek pembangunan, termasuk ekonomi, sosial, dan penyediaan layanan publik. Menurut badan pusat statistik (bps, 2023), jumlah penduduk mencerminkan kapasitas dan potensi suatu wilayah dalam hal sumber daya manusia, pasar, dan kebutuhan infrastruktur. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula kebutuhan akan fasilitas publik, pelayanan sosial, serta peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan daerah.

Dalam penelitian lain, kurnadi dan siregar (2022) menyebutkan bahwa jumlah penduduk juga menjadi variabel penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi dan kebijakan publik, karena distribusi dan pertumbuhan penduduk memengaruhi permintaan tenaga kerja, konsumsi, dan alokasi sumber daya daerah.

2. Konsep jumlah penduduk

Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi serta tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan tenaga kerja usahawan dalam menciptakan kegiatan ekonomi. Dalam pandangan teori konfusius yang diinterpretasikan oleh adioetomo, jumlah penduduk yang terlalu besar dapat menekan standar hidup masyarakat, terutama jika jumlah penduduk dibandingkan dengan luas lahan atau sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam konsep ini, konfusius beranggapan bahwa harus ada proporsi ideal antara jumlah penduduk dan sumber daya (misalnya luas tanah) agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara seimbang. Untuk mengatasi persoalan kelebihan penduduk, konfusius bahkan menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan pemindahan penduduk ke daerah yang masih kekurangan penduduk, sehingga persebaran penduduk menjadi lebih seimbang dan tidak terjadi tekanan pada sumber daya yang terbatas.

Menurut marhaeni (2019), laju pertumbuhan penduduk sangat dipengaruhi oleh tiga faktor demografis utama, yaitu fertilitas (tingkat kelahiran), mortalitas (tingkat kematian), dan migrasi (perpindahan penduduk). Fertilitas mencerminkan jumlah kelahiran bayi dalam periode tertentu yang menambah jumlah penduduk, sedangkan mortalitas menggambarkan pengurangan penduduk akibat kematian. Selain itu, migrasi—baik migrasi masuk maupun migrasi keluar—berdampak langsung pada perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah karena penduduk yang berpindah tempat tinggal akan menambah atau mengurangi jumlah populasi setempat. Ketiga faktor tersebut saling berinteraksi sehingga tingkat pertumbuhan penduduk suatu wilayah merupakan hasil dari kombinasi perubahan kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk yang terjadi secara bersamaan dalam periode waktu tertentu.

Teori menurut adam smith menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan input yang potensial yang dapat di gunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan. Semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat di gunakan.

Teori menurut robert malthus menganggap bahwa pada kondisi awal jumlah penduduk memang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun pada suatu keadaan optimum pertambahan penduduk tidak akan menaikkan pertumbuhan ekonomi malahan dapat menurunkannya.

2.1.7 Mutu SDM

1. Pengertian Mutu Sdm

Mutu sumber daya manusia (sdm) menggambarkan kualitas tenaga kerja yang mencerminkan pengetahuan, keterampilan, pendidikan, kesehatan, dan kompetensi individu yang berkontribusi terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian amelia putri & emily bellamy (2025) menjelaskan bahwa kualitas sdm, diukur melalui faktor-faktor seperti tingkat pendidikan dan status kesehatan, berperan penting dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Mutu sdm adalah tingkat kualitas tenaga kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kompetensi, pendidikan, dan kesehatan individu yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau aktivitas ekonomi. Mutu sdm menentukan seberapa produktif, efektif, dan efisien seseorang dalam menjalankan tugasnya, serta seberapa besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya saing suatu wilayah atau organisasi. Sdm yang berkualitas mampu menghasilkan output lebih tinggi, berinovasi, beradaptasi dengan perubahan teknologi, dan mendukung pembangunan ekonomi

secara berkelanjutan. Dalam literatur ekonomi, mutu sdm sering dikaitkan dengan konsep human capital, di mana peningkatan kualitas sdm melalui pendidikan, pelatihan, dan kesehatan dianggap sebagai investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Menurut becker (1993), mutu sdm merupakan modal manusia (human capital) yang mencakup pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kemampuan individu yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Becker menekankan bahwa investasi pada pendidikan dan pelatihan tenaga kerja akan meningkatkan kualitas sdm sehingga dapat meningkatkan output ekonomi dan daya saing suatu wilayah. Selain itu, schultz (1961) menambahkan bahwa mutu sdm berkaitan dengan kemampuan manusia dalam memanfaatkan sumber daya secara efisien dan inovatif. Sdm yang berkualitas memungkinkan masyarakat atau tenaga kerja tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan pembangunan berkelanjutan.

2.1.8 infrastruktur kaitannya terhadap kinerja pendapatan daerah

Infrastruktur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pendapatan daerah karena berperan sebagai fondasi utama dalam mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan basis penerimaan daerah. Menurut mankiw (2021), ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, transportasi, energi, dan jaringan komunikasi, mampu menurunkan biaya produksi dan distribusi, meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi, serta memperluas akses pasar. Kondisi ini secara langsung mendorong pertumbuhan sektor usaha dan investasi yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai komponen utama pendapatan daerah.

Dalam perspektif ekonomi makro, teori keynesian menjelaskan bahwa belanja pemerintah pada sektor infrastruktur memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian daerah. Investasi infrastruktur mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan output regional, yang selanjutnya meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah melalui peningkatan penerimaan daerah. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelayanan publik, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kinerja pendapatan daerah dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Dalam studinya, othman, rahman, dan saleh (2023) menemukan bahwa investasi dalam infrastruktur jalan, fasilitas transportasi, dan jaringan utilitas memperluas basis ekonomi lokal yang berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (pad) di beberapa provinsi di indonesia karena meningkatnya aktivitas usaha dan mobilitas

pasar. Tetapi juga mendorong tumbuhnya sektor usaha baru yang memperluas objek pajak dan retribusi daerah.

2.2 Penelitian terdahulu

1. Meuthia sri agustin, dkk (2023), pengaruh inflasi, pdrb, pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pendapatan asli daerah dan tingkat kesenjangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh secara negatif tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (pad) dan negatif signifikan terhadap tingkat kesenjangan daerah di provinsi kalimantan timur sementara pdrb, pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh secara positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah (pad) dan negatif signifikan terhadap tingkat kesenjangan daerah di provinsi kalimantan timur. Pendapatan asli daerah berpengaruh secara negatif signifikan terhadap tingkat kesenjangan daerah di provinsi kalimantan timur
2. Ariska oktiani (2021), pengaruh jumlah penduduk dan inflasi terhadap pendapatan asli daerah (pad) provinsi sumatera selatan, secara parsial jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah (pad) provinsi sumatera selatan. Sedangkan inflasi berpengaruhnya tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (pad) provinsi sumatera selatan. Secara simultan variabel jumlah penduduk dan inflasi
3. Saldi et.al (2021), analisis pengaruh pdrb dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah kabupaten kerinci, serta hasil analisis faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah di kabupaten kerinci, secara simultan variabel pdrb dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan secara parsial pdrb berpengaruh signifikan dan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan.
4. Rahmadewanti woretma dkk. (2022) meneliti *jumlah penduduk, jumlah wisatawan, pdrb, dan pengeluaran pemerintah* terhadap pendapatan asli daerah di kota makassar. Meskipun beberapa variabel berbeda, penelitian ini menegaskan bahwa jumlah penduduk dan pdrb berpengaruh terhadap pad, menunjukkan hubungan empiris variabel-variabel yang mirip dengan yang kamu teliti.
5. Febriana, sriningsih, & wafik (2023) meneliti pengaruh *pdrb, jumlah penduduk, belanja modal, dan dana perimbangan* terhadap pendapatan asli daerah (pad) di kabupaten lombok barat. Hasil menunjukkan bahwa pdrb dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pad, yang relevan jika variabel jumlah penduduk dan pdrb ingin dikaitkan dengan kinerja pendapatan daerah.